



PUTUSAN

Nomor 0318/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Wamelai, Kelurahan La Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 0318/Pdt.G/2019/PA.Rh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Desember 2011 M, bertepatan dengan Tanggal 12 Muharram 1433 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 269/06/XII/2011, tertanggal 8 Desember 2011;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Rh



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Agrey pina Mahilah Gregoria Bakasa, umur 7 tahun dan Bryan Alvaro Gregori Bakasa, umur 3 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perkecokkan yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk
 - b. Penggugat sering mendapatkan SMS dari perempuan lain dan perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat;
 - c. Tergugat sering melakukan judi on line;
 - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sering menyuruh Penggugat untuk bercerai;
 - e. Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya, namun pada kenyataannya Tergugat tidak berubah;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Rabu malam tanggal 24 Juli 2019, dimana pada saat itu Penggugat menerima telpon dari teman Penggugat dan pada saat yang sama Tergugat datang dan bertanya kepada Penggugat, " Telpon dari siapa itu ? " lalu Penggugat menjawab dengan jujur bahwa telpon tersebut dari Pak Jumrah dan selanjutnya Tergugat pada saat itu langsung merampas dan membanting HP Penggugat dan setelah itu memukul Penggugat bagian kepala, hidung dan mulut Penggugat dengan tangan yang menyebabkan hidung Penggugat mengeluarkan darah dan mulut Penggugat bengkak;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi kerumah orang tuanya dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 hari;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah di nasihati dan diperbaiki oleh keluarga kedua belah pihak;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang ibu sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan kedua orang anak tersebut di bawah penguasaan Penggugat;

11. Bahwa Tergugat seorang PNS berkewajiban untuk membiayai hidup kedua orang anak bernama Agreypina Mahilah Gregoria Bakasa dan Bryan Alvaro Gregori Bakasa sampai kedua anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun;

12. Bahwa dengan keadaa rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh 2 orang anak yang bernama bernama Agreypina Mahilah Gregoria Bakasa dan Bryan Alvaro Gregori Bakasa diserahkan kepada Penggugat;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Rh



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada saat pembacaan putusan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Abdul Salam., SHI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 0318/Pdt.G/2019/PA.Rh tanggal 22 Agustus 2019

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2019 menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0318/Pdt.G/2019/PA.Rh, telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019 Masehi,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Drs. Mustafa, M.H

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)